

SENGKETA TENUREAL : REFLEKSI PERTENTANGAN SENTRALISME HAK MENGUASAI NEGARA DALAM UUPA DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT

(Sebuah Catatan Menuju Reformasi Hukum Agraria yang Pluralis)

Oleh :

Achmad Basuki

ABSTRACT

Regulation of agrarian principles (UUPA) is one of traditional law product that is made to characteristic of agrarian colonial regulation into agrarian regulation that take place in accordance with the goal of Indonesian Republic. The regulation committee therefore underlines the importance of the rearrangement of ownership and exploitation agrarian resources. During the Orde Baru regime, The Right of Country control (HMN) was mislead into power centralism several investors. Local community role and existence was disturbed. This,, no doubt. emerged so many tenureal dispute. To avoid such incident happening again. UUPA as an Umbrella Provision should be reformed into an accommodative agrarian regulation character which also ensure the local community interests

Keywords : Regulation of agrarian principles, tenureal dispute, the local community interest

PENDAHULUAN

Sejak semula The Founding Fathers Republik Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan wujud penghormatan dan apresiasi filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keanekaragaman yang dimilikinya. Keanekaragaman yang dimaksud bisa dilihat pada realitas yang ada dalam berbagai kelompok masyarakat adat yang kini termasuk dalam bagian integral dari bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kelompok

penutur bahasa, maupun kelompok penganut ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman bangsa Indonesia ini akhirnya bermuara pada perbedaan adaptasi interaktif suatu komunitas terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini pada kenyataannya telah melahirkan komunitas-komunitas adat yang lebih memiliki kearifan lingkungan dan mode of production yang khas, berbeda satu dengan yang lain.

Dalam perjalanan kehidupan bernegara, untuk dan atas nama pembangunan pemerintah